

# *Prosiding*

Konferensi Nasional Sosiologi V  
Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia  
Padang, 18-19 Mei 2016



## GERAKAN SOSIAL DAN KEBANGKITAN BANGSA

Tim Editor :  
Jendrius, Emy Susanti, Ida Ruwaida,  
Bagus Haryono, Herlan, Azwar



**Kerjasama :**  
**APSSI dan Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Andalas**

**VOLUME I**

*Prosiding*  
**KONFERENSI NASIONAL SOSIOLOGI V**  
Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia  
Padang 18 – 19 MEI 2016

**GERAKAN SOSIAL  
DAN KEBANGKITAN BANGSA**

**Tim Editor:**

Jendrius (Universitas Andalas)  
Emy Susanti (Universitas Airlangga)  
Ida Ruwaida (Universitas Indonesia)  
Bagus Haryono (Universitas Sebelas Maret)  
Herlan (Universitas Tanjung Pura)  
Azwar (Universitas Andalas)

**e-ISBN:**

ISBN: 978-602-99467-03  
978-602-99467-1-0 (jil. 1)

**Kerjasama:**

APSSI dan Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Andalas

**Diterbitkan Oleh:**

Laboratorium Sosiologi, FISIP Universitas Andalas  
2016

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Subhanahuwataala, berkat limpahan karunia dan rahmat-Nya penyusunan prosiding Konferensi Nasional Sosiologi V ini berhasil diselesaikan. Konferensi yang mengambil tema *Gerakan Sosial dan Kebangkitan Bangsa* dan berlangsung dari tgl 18 – 19 Mei 2016 ini, melingkupi sub-tema yang cukup luas dan beragam. Karena itu penyusunan prosiding ini juga disesuaikan dengan sub-tema yang ada dalam konferensi tersebut.

Prosiding ini terdiri dari dua Volume. Volume I terdiri dari 7 BAB yakni (BAB I –BAB VII), mencakup beberapa sub-tema, yakni sub-tema gerakan perempuan, gerakan agraria, gerakan buruh, gerakan lingkungan, gerakan petani, gerakan kelompok marginal dan gerakan politik. Sementaraitu, Volume II terdiri dari 10 BAB (BAB VIII – BAB XVII) yang mencakup sub-tema yang lebih beragam yakni gerakan keagamaan, pendidikan transformatif, gerakan pemuda, keluarga, komunitas, gaya hidup, gender dan sub-tema lainnya.

Atas selesainya penyusunan prosiding ini, terima kasih tak terhingga diucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung mulai dari pelaksanaan konferensi sampai penyusunan prosiding ini. Kepada pengurus pusat Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI), Rektor Universitas Andalas, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Ketua Yayasan dan Direktur STKIP PGRI Sumatera Barat, para editor, panitia pelaksana serta semua pihak yang telah ikut bertungkus-lumus dalam membantu pelaksanaan Konferensi Nasional Sosiologi V dan penyusunan prosiding ini yang namanya tidak mungkin disebutkan satu-persatu, diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Padang, 18 Mei 2016

Tim Editor

# KOMODIFIKASI DESA WISATA: GERAKAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA DI BEJIHARJO, GUNUNGKIDUL

Victoria Sundari Handoko, S.Sos., M.Si.

## ABSTRACT

*Law of R.I. No. 10/2009 on Tourism has the vision to realize the development of tourism within the framework of sustainable development. Tourism operation should be able to preserve nature and environmental sustainability, as well as empowering local communities to improve their social economic welfare. Government as a facilitator in empowering rural communities gives fund through the Tourism National Program for Community Empowerment (PNPM) Mandiri. The number of villages that receive tourism PNPM-Mandiri increased, similarly in the Special Region of Yogyakarta increased from 94 (2010) to 127 (2013) rural tourism. The development of rural tourism is a community movement to their rural commodification. The Commodification from village to rural tourism is a modern movement of rural communities, what the goal of rural tourism commodification is to reduce poverty and increase employment. Commodification cause rural tourism in Bejiharjo, Gunungkidul, Yogyakarta was awarded the best of rural tourism in 2012 by the Deputy Minister of Tourism and Creative Economy. Nevertheless, the rural commodification contains an oxymoron concept that is on the one hand, community participation in the management of rural tourism able to overcome the problems of poverty population, but on the other hand power conflicts arise between operators with businessmen travel outside the village. It is instructive to analyze how the community deals with the trend of commodification from rural into a rural tourism as well as the reasons why the community commodification has led to conflicts between travel service operators.*

**Keywords :** *Commodification, Community Movement, and Rural Tourism.*

## I. PENDAHULUAN

Pariwisata menjadi industri terbesar di dunia ( *the world's largest industry* ) dan satu dari gambaran penting budaya konsumsi masa dan kehidupan modern (Britton 1991:451). Wisatawan bagi banyak negara menghasilkan pendapatan yang banyak bagi semua sektor di sekitar pariwisata, serta mampu memperkuat pembiayaan ekonomi pada tingkat global (Naisbitt, 1994; 108). Kondisi tersebut ditunjukkan dari data United Nations World Trade Organisation (UNWTO) dimana terdapat peningkatan kunjungan wisatawan internasional dari tahun 2012 sebesar 1.035 juta menjadi 1.087 juta pada tahun 2013 (naik sebesar 5%). UNWTO juga memproyeksikan bahwa jumlah wisatawan internasional naik menjadi sebesar 1,6 milyar pada tahun 2020 yang akan datang.

Industri pariwisata dunia menghasilkan jaringan interaksi yang kuat diantara banyak negara, dimana terdapat kecenderungan orang untuk berkunjung dari satu daerah atau negara yang mempunyai daya tarik alam, sejarah, budaya dan sebagainya, ke daerah atau negara lainnya. Jaringan hubungan antar negara tersebut memaksa negara-negara di dunia termasuk Indonesia ikut terlibat sebagai anggota dalam organisasi-organisasi internasional sampai dengan regional. Sejak keikutsertaan Indonesia dalam *General*

---

*Agreement on Trade in Services* (GATS), *ASEAN Framework and Services* (AFAS), dan dengan berdirinya World Trade Organization (WTO) maka pariwisata di Indonesia telah berubah menjadi liberalisasi jasa pariwisata. Meskipun demikian, liberalisasi jasa pariwisata menurut Widiatedja memaksa Indonesia harus mengizinkan beroperasinya pemasok jasa asing masuk ke Indonesia. Tiga subsektor jasa asing yang harus masuk di Indonesia yaitu: Pertama, hotel (minimal bintang 3); Kedua, Tour Operator/Travel Agent; dan Ketiga, Tenaga Kerja Asing (setingkat manajer) (Widiatedja, 2010, 79). Pemilikan dan penguasaan industri wisata oleh negara kapitalis metropolis di negara dunia ketiga menurut Britton mengakibatkan hubungan ekonomi yang eksploitatif dan tidak imbang (*unequal economic relations*) (1982; 331).

Kondisi ketergantungan dan eksploitatif tersebut muncul dalam konteks sistem pariwisata internasional yang bersifat massif (*mass tourism*) tersebut lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, dimana peran negara sebagai pemilik sumber daya dan perencana pembangunan pariwisata dominan sementara partisipasi masyarakat terbatas. Selain itu, Martin Mowforth dan Ian Munth menyatakan bahwa pertumbuhan pariwisata massal telah memunculkan berbagai masalah, seperti degradasi lingkungan, sosial dan budaya, ketimpangan distribusi keuntungan finansial, mempromosikan sikap paternalistik, dan juga penyebaran penyakit (1998, 95). Untuk itu, perubahan bentuk baru pariwisata sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan pariwisata yang bersifat massif tersebut. Dalam konteks paradigma baru pembangunan yang berkelanjutan (*new sustainable development perspective*), pariwisata yang berbasis komunitas adalah bentuk baru dalam konsumerisme di industri pariwisata. Perspektif pariwisata berkelanjutan perlu diusahakan oleh semua pihak tidak hanya oleh pemerintah saja. Pernyataan tersebut disampaikan oleh United Nations World Tourism Organization (UNWTO) bahwa pariwisata harus mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan berupa efisiensi energi, pelestarian keanekaragaman hayati, dan pekerjaan layak yang memperhatikan aspek lingkungan (*green jobs*).

Tindak lanjut dari kebijakan industri pariwisata tersebut, Indonesia membuat aturan pengelolaan pariwisata dengan UU No. 10 Tahun 2009 yang mempunyai visi dan misi menjadikan pembangunan pariwisata dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Pengembangan upaya terkait dengan program pemberdayaan di pedesaan dan juga daerah-daerah tertinggal telah diupayakan secara maksimal oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dalam hal ini dilakukan bersama dengan Dirjen Pengembangan Destinasi sebagai tanggapan terkait dengan adanya Inpres no 16 th 2005 dalam hal Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata. Pemerintah mendorong pelaksanaan dan pengembangan model pariwisata yang berbasis pada komunitas. Kebijakan resmi pemerintah tersebut bisa dipelajari dari adanya hal-hal yang mendasar dalam pengembangan pariwisata Indonesia, yaitu terdiri dari : **Pertama**, kekuatan utama pariwisata adalah masyarakat; **Kedua**, konsep pengembangan pariwisata dengan penekanan pada keterlibatan pariwisata dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat; dan **Ketiga**, pemerintah hanya menjadi fasilitator, sedangkan seluruh lapisan masyarakat menjadi pelaku utamanya dalam kegiatan pariwisata (Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF Indonesia, 2009).

Sebagai fasilitator dalam pemberdayaan pariwisata desa, pemerintah telah mengucurkan dana untuk pengembangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata. Jumlah desa penerima PNMP mandiri pariwisata mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun selanjutnya, dimana bisa dianalisis dari tahun 2009 terdapat sebanyak 144 desa wisata dan tahun 2014 meningkat sebanyak 1025 desa wisata (Kemenparekraf, 2014). Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat perkembangan desa menjadi desa wisata sejak tahun 2010 sebesar 94 desa wisata menjadi 127 pada tahun 2013. Perubahan desa menjadi desa wisata berdasarkan hasil penelitian di beberapa kabupaten di Yogyakarta menunjukkan arah perubahan yang positif bagi masyarakat. Penelitian di desa wisata Kembangarum (Andini, 2013;173) dan Desa wisata

Ketingan Tirtodadi Mlati, Sleman (Supartini, 2011; i) berhasil mengembangkan desa wisata yang berbasis komunitas, menghadirkan pengembangan sumber pendapatan desa dan untuk lebih mengembangkan pendapatan masyarakat yang lebih maksimal. Begitu juga pengembangan Desa wisata Kebonagung (Hastarto, dkk, 2014), desa wisata Tembi, dan desa wisata Candran (Dewanti, 2013; i) di Kabupaten Bantul, dimana pengembangan pariwisata berbasis komunitas terbukti tangguh dalam mengatasi masalah ekonomi dan sosial pasca gempa, serta mengembangkan jaringan antar desa wisata. Meskipun demikian terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan desa wisata di beberapa daerah, seperti : **Pertama**, Desa wisata banyak mengalami stagnasi, dimana penyebabnya adalah sistem manajemen desa wisata yang tidak bagus, sebagaimana dinyatakan oleh Nur Hadiyati (Kabid bagian Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sleman) bahwa data menunjukkan kurang dari lima belas desa wisata yang beroperasi maksimal di wilayah Kabupaten Sleman, sedangkan lebih dari 50 % desa wisata bisa dikatakan kondisi yang tidak mampu berkembang (stagnan). Desa wisata tersebut adalah Desa Wisata Tunggularum, Ngamboh, Mlangi, Trumpon, dan lain-lain (Harian Jogja, 26 Juni 2012); **Kedua**, Kekurangan Dana dalam pengembangan Desa Wisata. Bambang Legowo, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bantul menyatakan bahwa tigapuluh enam desa wisata di daerah Bantul sudah membuka usaha dengan dana swadaya masyarakatnya. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara workshop dengan topik “Bedah Desa Wisata” yang diadakan di Omah Kampong, Bantul (Tribun Yogya, 27 Maret 2014).

Kasus berbeda terjadi di Desa Wisata Bejiharjo Gunungkidul, dimana Gunungkidul sebagai salah satu kabupaten di DIY ikut mengembangkan desa wisata sebagai salah satu strategi untuk menanggulangi kemiskinan dan ketertinggalan daerahnya. Gerakan komunitas untuk mengembangkan Desa Bejiharjo menjadi desa wisata telah membuahkan hasil dengan dianugerahinya desa wisata tersebut sebagai desa wisata terbaik tahun 2012. Anugerah tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamen Parekraf) (Berita Antara, 25 September 2012). Desa Wisata Bejiharjo dianggap mampu meningkatkan kualitas pariwisata melalui program program yang dilaksanakan oleh penduduk, seperti program pemberdayaan masyarakat untuk tujuan penanggulangan kemiskinan, upaya peningkatan variasi lapangan pekerjaan penduduk untuk pengurangan pengangguran, serta gerakkan sosial ekonomi penduduk desa untuk kemajuan pariwisata yang berkelanjutan. Meskipun demikian dalam pengembangan desa wisata selanjutnya, gerakan komunitas melalui komodifikasi desa wisata Bejiharjo memunculkan gesekan-gesekan kepentingan dalam pengelolaannya. Perubahan drastis penduduk desa yang memperoleh uang secara luar biasa besarnya dari pengelolaan desa wisata tersebut ternyata memunculkan konflik dari awal perkembangannya sampai dengan sekarang ini. Berdasarkan laporan Tribun Jogja, pengembangan awal Desa Bejiharjo sebagai desa wisata dipersoalkan oleh Forum Warga Bejiharjo Peduli Pindul (FWBP) karena tidak sesuai/melanggar Perda RT/RW (SK Kepala Dinas Pariwisata Gunungkidul) dalam pembentukan Desa Bejiharjo sebagai Desa Wisata dan penggelontoran dana PNPM sebesar 160 juta rupiah (Tribun Jogja. Kamis, 14 Maret 2013). Selain itu, pemasukan objek wisata yang fantastis yaitu telah melampaui Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gunungkidul sebesar Rp. 4,6 miliar, ternyata tidak semua warga dapat menikmati hasilnya. Bahkan sejumlah warga Bejiharjo mengaku tidak semua warga mendapatkan hasil dari pendapatan pariwisata Goa Pindul (Kedaulatan Rakyat, 27 Februari 2013).

Berdasarkan kasus tersebut, gerakan komunitas untuk komodifikasi desa Bejiharjo menjadi desa wisata memendam konflik dalam pengelolaan sumberdaya alam desa wisata tersebut. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam sistem sosial-ekonomi dan kelembagaannya. Ketidakharmonisan dalam gerakan komunitas dalam komodifikasi di desa wisata tersebut menampilkan ketidakberdayaan masyarakat yang kemudian memunculkan konflik pengelolaan sumber daya berbasis alam dan kontestasi kekuasaan antara penduduk, elit lokal, pengelola wisata lokal, pengelola wisata dari luar, dan pemerintah. Sehingga menarik untuk diteliti terkait dengan : **Pertama**, Bagaimana gerakan komunitas dalam melakukan komodifikasi desa wisata ? dan **Kedua**, Mengapa

gerakan masyarakat dalam upaya untuk melakukan komodifikasi desa wisata tersebut memunculkan konflik antar sekretariat jasa wisata ?.

## 2. KOMODITAS, KOMODIFIKASI, DAN GERAKAN KOMUNITAS

Teori komodifikasi dapat dilacak dari tulisan Karl Marx dalam bukunya yang berjudul *Das Capital*, dimana buku tersebut merupakan studi tentang kapitalisme yang paling berpengaruh dalam pemikiran barat. Teori komodifikasi sendiri dimulai dari konsepnya tentang komoditas. Georg Lukacs (dalam Ritzer, 2011; 94) memberikan penjelasan bahwa komoditas terkait dengan masalah sentral dalam struktur masyarakat kapitalis. Bermula dari penciptaan komoditas inilah Marx dapat menjelaskan tentang paham Kapitalisme

Marx berpendapat bahwa komoditas adalah inti dari masyarakat kapitalis dimana di dalam sistem ekonomi kapitalis memunculkan dua kelas yaitu kaum proletariat dan kapitalis. Pandangannya tentang komoditas berakar dari orientasi materialis yang berfokus pada kegiatan produktif para pelaku ekonomi. Komoditas menurut Marx adalah: Pertama, komoditas merupakan objek yang posisinya berada diluar diri manusia (penciptanya); Kedua, ia bisa digunakan untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh dirinya; Ketiga, pada objek tersebut, kerja manusia ditambahkan; dan Keempat, tidak dikonsumsi oleh pemroduksinya itu sendiri, tetapi untuk kepentingan memenuhi pihak lain. Karl Marx dan George Simmel (Turner, 1992: 115 – 132) menyatakan sejak masyarakat mengenal ekonomi uang, disertai semangat melipatkannya, pada gilirannya akan memunculkan proses penciptaan komoditas atau komodifikasi barang dan jasa pada berbagai sektor kehidupan. Komodifikasi mempunyai pengertian dan konsep yang sangat luas. Hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan produksi komoditas dalam sistem perekonomian yang sempit tentang barangan yang diperdagangkan. Namun lebih substansial, komodifikasi berhadapan dengan proses mendistribusikan barang dan jasa tersebut dan bagaimana barang tersebut dipergunakan (Turner, 1992:115-132).

Marx memberikan pendapatnya terkait dengan sistem produksi dan terjadinya pertukaran komoditas sangat berbeda dengan dan menggantikan bentuk-bentuk tradisional pertukaran berbasis kewajiban, sehingga mengakibatkan terjadinya perluasan pasar. Ketika dikomodifikasi, barang-barang, layanan-layanan dan kualitas-kualitas mendapat nilai tukar yang memperluas sirkulasinya tetapi juga membentuk hubungan-hubungan sosial berupa resiprositas, timbal balik, pertukaran dan jual beli (Turner, 2009; 467). Terjadi proses perluasan ekonomi permintaan dan penawaran dalam praktik kehidupan manusia. Dinamika pergerakan ekonomi pasar dipandang akan mengaktivasi pelaku untuk fokus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang progresif. Kenaikan produksi dan penjualan memang terjadi dalam praktik tersebut, namun aspek pemerataan dan kesejahteraan bersama (*bonum commune*) tidak mudah untuk bisa terjadi.

Pendekatan Marx yang syarat ideologi dan praktik teknis empiris dan pada konteks tertentu tersebut masih berkuat pada ekonomi pasar yang justru menjadi sumber persoalan dalam peradaban modern. Berbeda dengan Marx, Karl Polanyi meskipun memperoleh inspirasi dari gagasan dari Marx, namun ia memiliki pemikiran yang berbeda sama sekali dari perluasan dan otonomi pasar. Polanyi sebagai pendukung ekonomi politik merupakan kritikus terkait ekonomi liberalism “pasar”, di mana pasar memiliki mekanisme tersendiri dalam mengatur dirinya sendiri dan memperoleh manfaat dan profit untuk diri pribadinya. Polanyi menjelaskan secara tegas bahwa teori permintaan dan penawaran bukan satu instrumen yang menyelesaikan, karena ia telah membuat pelaku ekonomi tercerabut (*terlepas*) akar sosio-kulturalnya yang sudah berlangsung lama dan mendalam. Polanyi mengkritik secara tajam pada konsep Marx, kapitalisme yang dikritiknya dan tesis ekonomi sosialisme yang disusunnya tidak dipilih sebagai suatu alternatif, dia membangun satu konsep yang dikenal sebagai keterlekatan (*embeddedness*) dan *disembeddedness* (ketercerabutan). Konsep keterlekatan mengkritik sosialisme ekonomi yang sudah dikembangkan oleh Marx sebagai tokoh penting Sosiologi, maupun ekonomi kapitalisme sama-sama saling bersitegang terkait relasi ekonomi yang sudah tercerabut dari masyarakatnya.

Karl Polanyi dalam buku berjudul *The Great Transformation* menampilkan



bahasan secara gamblang, bagaimana bekerjanya ekonomi pasar kapitalis liberal. Selanjutnya Polanyi membalik logika pada prinsip aktivitas kesalingan dalam permintaan dan penawaran. Dalam sistem ekonomi pasar tersebut, Polanyi mengatakan sekali lagi bahwa adanya relasi ekonomi yang sudah tidak lagi melekat dalam relasi-relasi dan kekuatan sosial masyarakat, tetapi relasi-relasi sosial tersebut sudah semakin tercerabut dan dilekatkan pada perilaku sistem dalam ekonomi pasar kapitalis tersebut (1944/2001:57). Ekonomi pasar yang dinyatakan memiliki kekuatan sendiri untuk mengatur pada dasarnya juga memiliki kelalaian untuk mengatasi diri mereka sendiri. Hal tersebut tidak menciptakan ketertiban dan bahkan menimbulkan kerusakan pada relasinya. Bahkan menurut Polanyi, badan-badan negara dan campurtangan mereka dalam pasar yang sejatinya membuat pasar bekerja dan tidak mungkin akibat “tangan tak kelihatan (*invisible hand*)”.

Pasar liberal dengan klaim “tangan tak kelihatan” membuat segala sesuatu dapat dikomodifikasi menjadi komoditas dagangan atas dasar pendekatan “suka sama suka”. Selanjutnya, Polanyi menampilkan realitas terkait dengan tanah (atau lebih luas alam), tenaga kerja, dan uang, pasar kapitalis tidak akan pernah berhasil mengkomodifikasi sepenuhnya. Bagi Polanyi, tiga komoditas tersebut yaitu tanah, tenaga kerja, dan uang sesungguhnya bukanlah komoditi atau barang dagangan itu sendiri (atau biasanya disebut dengan istilah komoditas fiktif) (1994/2001, xxvi). Hal ini menurut Block dan Evans tenaga kerja hanyalah aktivitas manusia, tanah adalah alam yang dibagi menjadi persil-persil, dan uang yang beredar dalam perekonomian nasional hampir selalu bergantung pada "keyakinan dan kepercayaan penuh" dari suatu atau pemerintah lainnya (2005;506). Oleh karena itu, komoditas tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai komoditas (barang dagangan), karena ketiga komoditas tidak ada yang mampu memproduksinya. Hanya komoditas nyata (riil) yang bisa diperdagangkan karena komoditas nyata yang telah diproduksi untuk dijual di pasar (Polanyi, 1994/2001, xxvi). Dalam kaitan ini, ahli ekonomi modern sering memperlakukan komoditas fiktif dalam cara yang sama seperti komoditas nyata. Sebagai contohnya, tanah yang diperlakukan sepenuhnya sebagai komoditi yang diperdagangkan, dimana kondisi tersebut sebetulnya kontradiksi dengan hakekat alam sebagai yang digambarkan sebagai komoditas fiktif.

Sebagaimana disampaikan oleh Polanyi, dimana syarat kehidupan masyarakat yang utama adalah tenaga kerja dan tanah. Sehingga akan menyebabkan kondisi yang merendahkan hakekat manusia maupun masyarakat itu sendiri dan kemudian akan memunculkan gejala perlawanan apabila menyerahkannya dalam mekanisme pasar. Institusi ekonomi pasar dengan begitu tidak akan bisa berlangsung lama, apabila tidak menghilangkan kondisi dari hakekat alamiah dari sisi manusia. Hal ini disebabkan karena manusia akan mengalami kondisi kerusakan dan meombak lingkungan secara fisik berubah menjadi sesuatu yang tanpa kendali, dan untuk langkah selanjutnya akan ada upaya perlindungan diri dari masyarakat (Polanyi, 1944/2001; 3).

Selama hampir tiga abad, peradaban masyarakat dikelola dan diatur dengan adanya apa yang disebut dengan pergerakan ganda. Pertama, pasar dengan seluruh perilakunya berekspansi memasuki sendi-sendi kehidupan modern. Kedua, Pada sisi lain gerakan pasar tersebut bertemu dengan suatu gerakan tandingan (*counter movement*) menghadapi perluasan ini agar memiliki arah jalan yang tidak sama. Gerakan ini sebagai upaya untuk memberikan tameng bagi masyarakat dalam suatu upaya melakukan gerakan tandingan. Tujuan akhir dari upaya gerakan ini sebetulnya tidak sesuai dengan prinsip pasar yang mengatur dirinya sendiri dan dengan demikian tidak cocok dengan sistem pasar itu sendiri (Polanyi, 1944/2001;130). Pergerakan ganda tersebut terus menerus berlangsung dan bermaksud mengubah harapan untuk menggantikan suatu sistem yang bertujuan untuk komodifikasi manusia, uang dan alam (komoditas semu) dimana sistem tersebut berlangsung dan kemudian dipraktikkan dalam sistem pasar yang disebut dengan swatata menggunakan komoditas yang nyata atau real. Dalam hal ini berarti bahwa pasar swatata atau yang disebut dengan *self-regulating market* dianggap tidak relevan sepenuhnya dan harus digantikan oleh pasar yang dapat dikendalikan oleh peran negara (*regulated market*) (Polanyi, 1994/2001).

Polanyi bersikeras bahwa untuk menghindari penghancuran masyarakat, penyediaan, dan permintaan komoditas fiktif dalam masyarakat pasar yang sebenarnya, maka harus dikelola melalui proses politik. Formulasinya cukup berbeda dari analisis Marx tentang kontradiksi-kontradiksi kapitalisme. Marx membentuk sebuah model analitik dari ekonomi kapitalis yang berfungsi penuh dan kemudian berpendapat bahwa sistem yang dihasilkan tunduk pada kontradiksi yang intens yang dapat diharapkan untuk mewujudkan diri dalam krisis periodik. Marx menganalisa versi murni kapitalisme dan menemukannya rentan terhadap krisis, sementara Polanyi menegaskan bahwa tidak akan ada versi murni masyarakat pasar karena tanah, tenaga kerja, dan uang bukanlah komoditas yang sebenarnya (Block, 2003; 7).

Polanyi menekankan tidak ada kekuatan pasar yang mengatur dirinya, kecuali harus dikendalikan oleh institusi politik. Dalam hal menekankan pentingnya institusi politik, Polanyi mempunyai kesamaan dengan Marx. Oleh karena itu, keduanya sering dianggap sebagai pemikir sosialisme ekonomi yang mempunyai pengaruh besar di dalam pengembangan ilmu ekonomi, sosiologi dan politik. Secara lebih tepat, keduanya merupakan pemikir ekonomi politik yang mewarnai pemikiran pembangunan. Ketika pasar yang menjadi andalan kapitalisme mulai bergerak liberal dan menceraub konsep ekonomi sebagai kegiatan kolektif untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan bersama, gerakan sosialisme negara diperlukan untuk mengerem laju kerusakan yang ditimbulkannya. Akibat pasar yang liberal, masyarakat dapat terbelah dan terpolakan menjadi kelompok pengusaha dan buruh, kemudian lebih ekstrim menjadi kaum borjuasi dan kelompok proletariat. Perluasan kelembagaan pasar berpeluang pada terjadinya perkembangan ekonomi yang cepat, namun ketidaksamaan antar golongan dan kelompok tersebut semakin meningkat. Hal yang paling substansial dalam proses ekonomi sejatinya terletak pada tindakan manusia dan masyarakatnya dalam praktik kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara luas dan berkeadilan. Disini, Polanyi menegaskan bahwa pasar bebas liberal tidak bisa berjalan "swatata semauanya", karena praktik pasar berada dalam ruang dan tindakan bersama dalam masyarakat. Dia juga tidak mengkonfrontasi pasar seperti Marx lakukan. Dia menyoroti bahwa ekonomi dengan sistem kapitalisme mulai melakukan gerakan untuk menceraub masyarakat kapitalis dari tindakan ekonomi yang tercerabut dari akar dan relasi sosial masyarakat itu sendiri (Molan, 2010).

Gagasan ekonomi liberal yang dikendalikan institusi politik atau secara singkat disebut sebagai gerakan sosialisme ekonomi yang memiliki tindakan yang berbeda. Tujuan utama dari gerakan ini memiliki kesamaan. Hal ini yang sering membuat penyeteraan antara pemikiran Marx dan Polanyi. Keduanya sama-sama bertujuan bahwa manusia harus dihargai dan tidak boleh dikorbankan dalam proses ekonomi. Ekonomi tidak boleh memarginalisasi hakikat kemanusiaan dan tidak boleh membuat tindakan yang membedakan manusia satu dengan lainnya sehingga memunculkan tindakan yang berpotensi menyebabkan ketidakadilan dan situasi penekanan pada masyarakat itu sendiri. Tujuan mulia itu dicapai dengan tindakan praktis yang berbeda antara Marx dan Polanyi. Marx menambatkan pada kekuatan buruh yang tertindas untuk "sadar diri" menumbangkan kelas penguasa/pengatur (*ruling class*) dan menguasai pengaturan produksi dalam masyarakat. Polanyi memiliki perbedaan jalan dan cara pandang dimana ekonomi dan proses produksinya harus dilekatkan pada relasi manusia berdasarkan pada etika, norma dan dijalankan pada prinsip-prinsip keadilan (Molan, 2010). Singkatnya, Marx menggunakan cara-cara yang ekstra radikal dan Polanyi mendasarkan pada bentuk tindakan yang lebih ramah dan mendalam dalam system sosial masyarakat.

Konsep keterlekatan (*embeddedness*) merupakan konsep yang paling berharga dari Polanyi. Hal tersebut merupakan tradisi pemikiran Sosiologi Ekonomi yang mendasar, sekaligus kritik terhadap ekonomi otonom. Kekuatan otonom dari pasar, tanpa peran negara dan mengembalikannya pada relasi sosial masyarakat akan berpeluanga menciptakan kerusakan. Ketiganya saling berkaitan. Dengan kata lain, menurut Polanyi, suatu pilihan dan tindakan ekonomi harus mengakar pada struktur sosial. Institusi politik harus mendorong tindakan ekonomi berlangsung dalam masyarakat untuk memperkuat

kehidupan yang setara. Sayangnya pandangan Polanyi juga bukan cara yang mudah untuk mencapai tujuan kemanusiaan. Hal tersebut terjadi karena kapitalisme memiliki prinsip bukan subjek yang menjadi penentu bagi ekonomi, melainkan sebaliknya yang terjadi adalah bahwa ekonomi itu sendiri yang menjadi penentu bagi subjek (Smelser dan Swedberg, 2005; 13).

Kritik mereka atas paradigma Neoklasik dengan tokoh utamanya seperti Adam Smith, David Ricardo, dan sebagainya yang menempatkan negara dan pasar secara berbeda atau terpisah (*disemmeded*). Kritik mereka atas paradigma tersebut diperkuat oleh Block dan Evans yang menyatakan bahwa: **Pertama**, negara dan ekonomi tidak dalam wilayah yang otonom secara analitis tetapi merupakan bidang kegiatan yang saling mempengaruhi; **Kedua**, baik negara dan ekonomi yang tertanam dalam masyarakat memiliki struktur kelembagaan yang spesifik, dan keterlekatan (*embeddedness*) ini memainkan peran penting baik dalam hasil ekonomi maupun politik; **Ketiga**, keterlekatan ini adalah dinamis; sering dibentuk kembali oleh inovasi kelembagaan yang membentuk kembali cara bahwa negara dan ekonomi saling bersinggungan (Evans, 2005; 505). Masyarakat sipil disusun oleh lembaga negara, termasuk aturan-aturan hukum dan praktek-praktek organisasi pemerintah, tetapi masyarakat sipil juga membentuk tindakan negara dan struktur negara. Hal ini dapat dijelaskan dalam hubungan segitiga (*the triangular relationship*) antara negara, ekonomi, dan masyarakat sipil, dengan penekanan pada yang mana “lebih negara atau lebih pasar (ekonomi)” (Block dan Evans, 2005; 520). Mereka menegaskan bahwa sukses tidak tergantung pada menemukan keseimbangan magis antara pasar dan negara, tetapi pada membangun lembaga yang memungkinkan interaksi produktif struktur negara, pelaku pasar, dan masyarakat madani (2005; 520).

Penelitian ini selanjutnya bertujuan untuk melakukan analisis terkait dengan adanya komodifikasi desa wisata. Komodifikasi yang dimaksudkan disini merupakan suatu alur menjadikan sesuatu, dimana proses tersebut sebelumnya bukan merupakan suatu benda komoditas, kemudian diubah dalam bentuk komoditas. Komoditas yang dimaksud adalah terdiri dari wisata alam seperti Goa Pindul, Goa Gelatik, dan Sungai Oya. Selain itu, wisata sejarah berupa monumen Serbuan Jenderal Soedirman dan situs Megalitikum. Komodifikasi yang dimaksudkan disini bukan berarti hanya melakukan produksi atas komoditas untuk arti komoditas ekonomi dalam pengertian yang sempit yaitu terkait barang-barang produksi untuk dijual. Akan tetapi juga berkaitan dengan proses komoditas atau barang itu akan dilakukan proses pengelolaan serta pengkonseptualisasikan dari sisi bagaimana proses produksi dilakukan, kemudian dilakukan distribusi atas komoditas, serta kemudian melakukan konsumsi atas komoditas tersebut. Desa wisata Bejiharho beserta lingkungannya dibuat, ditata, dikembangkan, serta dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata demi meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Proses perkembangan pariwisata tersebut mengalami komodifikasi dalam pengelolaannya.

Seperti halnya kegiatan ekonomi yang lain, kegiatan pariwisata juga bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dimana dalam pencapaiannya seringkali memunculkan konflik sosial. Sektor-sektor sosial yang berbeda yang terlibat dalam kegiatan pariwisata tidak hanya tidak memiliki kepentingan yang sama, tetapi sering menghadirkan posisi yang berlawanan (Cañada, 2011; 25). Sebagaimana halnya yang disampaikan oleh Karl Marx bahwa konflik itu sendiri adalah kekuasaan. Kekuasaan ini terjadi diantara mereka yang memiliki kapital dan mereka yang tidak mempunyai kapital dalam masyarakat kapitalis. Menurut Andersen, dalam perspektif konflik, masyarakat terdiri dari kelompok kepentingan yang saling bersaing, beberapa diantaranya memiliki kekuatan lebih daripada orang lain. Berbagai kelompok berjuang atas sumber daya sosial dan bersaing untuk keuntungan sosial. Teori Konflik berpendapat bahwa mereka yang mengendalikan sumber daya masyarakat juga memegang kekuasaan atas orang lain. Penguasa cenderung bertindak dengan cara mereproduksi keuntungan mereka dan mencoba untuk membentuk kepercayaan masyarakat dengan cara membuat hak istimewa bagi mereka (Andersen dan Taylor, 2000; 252).

Sejalan dengan pandangan Polanyi, komodifikasi sumberdaya alam yang terbatas

berpeluang menghasilkan hak-hak istimewa (*privileges*). Hak penguasaan atau terlebih pada hak-hak kepemilikan atas sumberdaya alam merupakan bentuk dan struktur pasar yang paling tidak sempurna, cenderung memonopoli dan mendominasi. Pasar yang bekerja pada struktur dominasi atau kelompok yang menguasai dan tidak dikuasai, atau memiliki luas dan tidak memiliki sama sekali—tentu menghasilkan persiangan yang tidak setara dan bahkan tidak sehat. Ketidaksetaraan akan menghasilkan konflik dan ketimpangan antar pelaku dalam masyarakat yang berdampak luas pada kesenjangan hasil dan distribusi kesejahteraan masyarakat. Pendapat ini sesuai dengan apa yang menjadi konsep penting yang dikembangkan oleh Marxis. Dimana Gould dan Schnaiberg menyatakan bahwa kemajuan dan perkembangan ekonomi menyebabkan ketimpangan sosial, bahkan konflik pengelolaan sumberdaya alam mempunyai implikasi pada terjadinya kerusakan alam, polusi, serta dampak yang lebih buruk lagi yaitu ketimpangan dan strukturasi karena adanya pendapatan dari perolehan pengelolaan alam yang terjadi sehingga memunculkan kepemilikan yang timpang juga (Green, 2005).

Gesekan kepentingan dalam komodifikasi pariwisata sering terjadi antara stakeholder masyarakat lokal dan luar, meskipun wisata desa secara implisit diasumsikan untuk menjadi sarana bagi pembangunan yang berkelanjutan, terdapat beberapa peristiwa dimana juga menjadi suatu sumber konflik dalam masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Ertuna dan Gülşen Kirbaş bahwa persoalan-persoalan tersebut mungkin muncul atas kontrol modal alam dan penggunaan tanah, distribusi pendapatan dan keuntungan dari pariwisata stakeholder nya dan potensi terjadinya penggeseran komunitas lokal (2012;18). Untuk itu, konflik atas sumber daya alam, sosial, dan ekonomi menjadi penting untuk diperhatikan dimana nantinya apakah konflik tersebut memberikan arti positif bagi terjadinya penguatan kelompok ataukah memberikan dampak negatif, menjadi kunci utama bagi keberlanjutan pariwisata.

### **3.METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mempekerjakan etnografi sebagai metode. Etnografi merupakan desain penelitian kualitatif, sehingga peneliti dapat menggambarkan dan menafsirkan unsur-unsur dari kelompok budaya dalam berbagai dimensinya, seperti pola perilaku, kepercayaan dan Bahasa yang berkembang dari waktu ke waktu (Creswell, 2012: 462). Peneliti mempelajari gerakan komunitas untuk komodifikasi desa wisata berbasis alam dengan cara tinggal di desa tersebut selama beberapa bulan untuk melakukan pengamatan mendalam dan wawancara pelaku wisata, joki, pemerintah desa, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan pihak keamanan. Adapun analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif, dimana dalam tahap pertama analisis, peneliti memahami keseluruhan data yang diperoleh, setelah itu proses reduksi data dilakukan dengan cara meringkas data, terakhir data disusun menurut ukuran yang sesuai dengan pertanyaan untuk menentukan koding dan kategori.

### **4.TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

Desa Wisata Bejiharjo berada di Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Desa wisata ini berjarak kurang lebih 42 km dari kota Yogyakarta. Kesuburan tanah di desa ini karena dialiri oleh Sungai Oyo dan terdapat mata air didalam tanah atau goa seperti mata air Gedong Tujuh dan Sungai Banyumoto yang mengalir dalam Goa Pindul. Kondisi ini yang membedakan Desa Bejiharjo berbeda dengan desa-desa lain di Gunungkidul yang terkenal tandus dan kering. Desa wisata ini terkenal sebagai desa wisata, desa budaya, sejarah, dan pendidikan. Salah satu daya tarik wisata yang cukup terkenal yaitu Goa Pindul yaitu wisata susur goa menggunakan ban dalam (*cave tubing*), seperti di Brasil dan Venezuela.

Masyarakat bersama dengan pemerintah menentukan Goa Pindul di Dusun

Gelaran I Desa Bejiharjo sebagai destinasi wisata, yang kemudian disusul dengan pembukaan destinasi wisata lain di Desa Bejiharjo seperti Situs Sokoliman di Dusun Dusun Sokoliman II, Goa Emas terdiri dari deretan Goa Gereng, Goa Asri, dan Goa Emas yang saling berhubungan, dimana lokasinya berada di Dusun Seropan, dan Danau Mriwis Putih di Dusun Banyubening II. Gerakan komunitas untuk pembukaan wisata dimulai dari Goa Pindul oleh Subagyo Tukidjo, Ratmin, Paryo dan kawan-kawan dengan membersihkan berbagai sampah yang ada di dalam dan sekitar Goa Pindul. Penyadaran juga diberikan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan Goa Pindul sebagai tempat sampah, MCK (Mandi, Cuci, dan Kakus), dan memandikan hewan ternak seperti sapi. Gerakan penyadaran membuahkan hasil dengan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama mengembangkan desa Bejiharjo sebagai desa wisata dan peresmian dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2010 oleh Prof. Dr. Ir. H. Sumpeno Putro, MSC. almarhum selaku Bupati Gunungkidul pada waktu itu.

Pada awal berdirinya dibentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) DEWA BEJO oleh pemerintah. Penduduk mengembangkan destinasi wisata lain selain Goa Pindul (Goa Pindul dengan *cave tubing* nya), yaitu **Pertama**, wisata alam seperti Goa Gelatik dan Goa Sriti dengan *caving* nya, Goa Emas Goa Asri, Goa Gereng dan Goa Emas, Sungai Oyo dengan *rafting* dan *off road* nya, dan Telaga Mriwis Putih; **Kedua**, wisata sejarah yaitu Monumen Serbuan Pangsar Jenderal Soedirman dan Situs Megalitikum Sokoliman; **Ketiga**, wisata budaya seperti wayang sodo, wayang beber, reog, gejog lesung, dan rasulan. Penduduk mengkomodifikasikan kekayaan alam dan budayanya supaya bisa dinikmati oleh wisatawan.

Goa Pindul sebagai primadona wisata di desa Bejiharjo digambarkan oleh penduduknya sebagai “Demit Dadi Duwit” (Rohim, 2013;x). “Demit Dadi Duwit” artinya Goa yang disakralkan oleh penduduk karena sebagai tempat roh-roh halus tinggal dan tidak bisa sembarang orang masuk ke dalamnya. Penduduk telah berhasil merubahnya menjadi destinasi wisata alam yang sangat menarik dengan mengkomodifikasikannya yaitu dengan cara “menjual” keindahan alamnya untuk menghasilkan uang bagi kesejahteraan penduduk. Goa pindul menjadi salah satu wisata andalan yang menjadi magnet penarik wisatawan berkunjung dan menyusuri goa tersebut serta destinasi wisata lain di Desa Bejiharjo seperti *rafting* dan *off road* Sungai Oyo, *caving* goa-goa, dan sebagainya. Hal ini terbukti dengan semakin bertambahnya jumlah kunjungan baik wisatawan lokal, wisatawan nusantara, maupun manca negara yang peningkatannya luar biasa.

Terjadinya peningkatan jumlah wisatawan yang dari tahun ke tahun terus bertambah. Kunjungan wisatawan biasanya paling banyak pada hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional. Banyaknya jumlah wisatawan kadangkala membuat sekretariat Dewa Bejo tidak mampu melayani kebutuhan semua wisatawan yang datang. Oleh karena itu, mulai berdiri sekretariat wisata baru lainnya seperti Wira Wisata (tahun 2011), Panca Wisata (tahun 2012), dan Tunas Wisata (2013), dimana keempat sekretariat wisata ini dianggap mempunyai hak pengelolaan yang sah. Jasa wisata lain yang ikut berdiri mendukung keempat sekretariat yang ada seperti Sokolimo, Mriwis putih, Gelaran Indah, Sumber Banyu Moto, dan Panji Wisata (sudah tutup). Sedangkan Trip Goa Pindul dan Kang Haris didirikan sebagai marketing dari Panca Wisata dan Wira Wisata.

Jumlah kunjungan wisata yang makin meningkat bisa dilihat dari data jumlah kunjungan wisata di Sekretariat Dewa Bejo dan Sekretariat Wira Wisata. Data dari sekretariat Dewa Bejo menunjukkan bahwa tahun 2010 terdapat 98 wisatawan local dengan pendapatan Rp. 3.430.000,- dan tahun 2015 melonjak menjadi 76.6126 wisatawan local dan asing dengan pendapatan Rp. 2.681.420.000,- (Pokdarwis Dewa Bejo, 2016). Data dari sekretariat Wira Wisata menunjukkan bahwa tahun 2011 terdapat kunjungan 2011 wisatawan (pendapatan Rp. 180.863.000) dan meningkat secara tajam pada tahun 2015 yaitu sebesar 99.624 wisatawan (pendapatan Rp. 3.984.989.000,-) wisatawan asing dan local (Wira Wisata, 2016). Berikut adalah situasi membludaknya wisatawan di depan Goa Pindul pada saat liburan Natal dan Tahun Baru 2016.



Foto diambil Desember 2015.

Pada tahun 2012, Desa Bejiharjo mendapatkan penghargaan sebagai juara pertama desa wisata tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta dan dianugerahi sebagai Desa Wisata terbaik. Penganugerahan diberikan oleh Wamen Parekraf di Jakarta. Selain itu juga menerima PNPM Mandiri pada tahun yang sama dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Meskipun demikian, sejak sampai dengan sekarang ini, Desa Wisata Bejiharjo telah memunculkan konflik antar pelaku wisata dalam pengelolaannya. Padahal melalui penghargaan tersebut, Desa Wisata Bejiharjo dianggap mampu dan dalam realitasnya memang mampu memberikan peningkatan dalam kualitas desa wisata. Upaya tersebut berhasil memberikan nilai tambah bagi penduduk seperti pertambahan lapangan pekerjaan, memampukan masyarakat untuk melakukan pemberdayaan masyarakat untuk bisa melakukan penanggulangan kemiskinan, mampu menjadi penggerak dan katalisator ekonomi penduduk, serta mampu menarik kembali pulang penduduk desa yang bermigrasi ke luar desa.

Konflik yang terjadi sebagai hasil gerakan komunitas untuk komodifikasi Desa Wisata Bejiharjo sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 dan mengapa konflik terjadi diuraikan sebagai berikut : **Pertama**, Konflik antara pemilik tanah dari luar desa (pengusaha luar desa) di atas Goa pindul dan penduduk. Pemilik tanah di atas Goa Pindul mengusulkan gugatan ke pihak kepolisian dan memberikan pernyataan bahwa Goa Pindul merupakan miliknya. Hal ini disebabkan karena posisi Goa Pindul yang persis berada di bawah tanah dan rumahnya. Sementara itu masyarakat yang diwakili pihak Pokdarwis Dewa Bejo menyatakan kepemilikan Goa Pindul sebagai milik penduduk desa atau komunitas lokal. Atas kasus tersebut, pemerintah menyatakan bahwa masyarakat legal mengelola Goa Pindul; **Kedua**, Desa Bejiharjo sebagai desa wisata dipersoalkan oleh Forum Warga Bejiharjo Peduli Pindul (FWBP) karena tidak sesuai/melanggar Perda RT/RW (SK Kepala Dinas Pariwisata Gunungkidul) dalam pembentukan Desa Bejiharjo sebagai Desa Wisata; **Ketiga**, adanya retribusi yang ditarik dari pemerintah sebesar Rp. 10.000,- untuk masuk ke Desa Wisata Bejiharjo pada tahun 2014 memunculkan konflik antara pemerintah dan operator-operator wisata karena dianggap tidak menguntungkan operator wisata; **Keempat**, penambahan jumlah operator jasa wisata menjadi 11 pengelola memunculkan persaingan yang kurang sehat karena banyaknya jumlah operator pengelola wisata menyebabkan jumlah pendapatan masing- masing operator menurun. Selain itu juga konflik dipicu oleh hadirnya joki yang ikut mengambil keuntungan dan ikut memainkan harga dari setiap wisatawan melalui operator wisata. Joki-joki berada di beberapa lokasi seperti Kali Penthung, Hutan Bunder, Kota Wonosari, Dusun Grogol, dan sebagainya sebelum masuk ke Desa Wisata Bejiharjo. Joki bertugas menunjukkan

jalan ke Desa Wisata Bejiharjo dengan mendapatkan bayaran dari operator wisata. Berikut gambar joki di beberapa lokasi.



Konflik-konflik tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pariwisata di desa wisata Bejiharjo tidak hanya menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakatnya tetapi juga memunculkan konflik sosial. Konflik sosial tersebut muncul karena menghadirkan posisi yang berlawanan antara berbagai pelaku wisata. Konflik perebutan atas tanah (alam) sebagaimana terjadi di Desa Wisata Bejiharjo dimana komodifikasi atas wisata alam sebagaimana dikatakan oleh Polanyi sebagai komoditas fiktif memang akan memunculkan konflik dan gerakan komunitas untuk saling memperebutkannya. Hal ini disebabkan karena tanah (alam), tenaga kerja, dan uang adalah komoditas fiktif. Oleh karena itu, Polanyi menyatakan bahwa untuk menghindari penghancuran masyarakat, penyediaan, dan permintaan komoditas fiktif dalam masyarakat pasar yang sebenarnya, maka harus dikelola melalui proses politik. Proses politik adalah pembuatan kebijakan publik yang melibatkan banyak pelaku kepentingan dan sumber daya yang dimiliki.

Proses politik untuk menghasilkan kebijakan terkait sistem pengelolaan konflik yang adil bagi semua penduduk sudah diupayakan bersama-sama antara sekretariat atau operator wisata, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pihak Keamanan, dan sebagainya. Semua pihak berusaha mengatasi permasalahan tersebut dengan duduk bersama dengan cara musyawarah dan mufakat untuk menghasilkan kesepakatan-kesepakatan bersama, meskipun proses menghasilkan aturan formal dan informal sampai dengan sekarang ini belum tercapai. Pemerintah dan Negara yang berusaha mendudukan diri bersama masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah atau Negara berusaha membangun interaksi produktif struktur negara, pelaku wisata, dan masyarakat.

## 5.KESIMPULAN

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan local maupun mancanegara di Desa Wisata Bejiharjo membawa manfaat peningkatan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Meskipun demikian, muncul konflik yang terjadi sebagai hasil gerakan komunitas untuk komodifikasi Desa Wisata Bejiharjo sejak tahun 2012 sampai dengan 2016. Konflik yang terjadi mulai dari konflik antara pemilik tanah di atas Goa Pindul dan penduduk, konflik atas persoalan Desa Bejiharjo yang diubah menjadi desa wisata dipersoalkan oleh Forum Warga Bejiharjo Peduli Pindul (FWBP), retribusi masuk Desa Wisata Bejiharjo, dan penambahan jumlah operator jasa wisata.

Sekretariat atau operator wisata, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pihak Keamanan, dan sebagainya telah berupaya untuk mengatasi persoalan tersebut. Mereka bersama-sama bermusyawarah untuk menghasilkan kebijakan terkait sistem pengelolaan konflik yang adil bagi semua penduduk. Harapannya kebijakan yang dihasilkan adalah kebijakan yang berpihak pada kebutuhan bagi seluruh penduduk Desa Bejiharjo.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Andersen, Margaret L. Dan Howard F. Taylor. 2000. *Sociology: Understanding a Diverse Society*. Wadsworth. Amerika.
- Andini, Nurulitha. 2013. Pengorganisasian Komunitas dalam Pengembangan Agrowisata di Desa Wisata Studi Kasus: Desa Wisata Kembangarum, Kabupaten Sleman. Dalam *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 24 No. 3, Desember 2013.
- Berita Antara. Selasa 25 September 2012. [http://desawisatabejiharjo.net/lomba\\_desawisata\\_2012.html](http://desawisatabejiharjo.net/lomba_desawisata_2012.html). Dikutip 27 April 2016.
- Block, Fred and Peter Evans. 2005. The State and the Economy. Dalam *The Handbook of Economic Sociology*. Neil J. Smelser and Richard Swedberg (editor). Princeton University Press. New York
- Britton, Stephen. 1982. The Political Economy of Tourism in the World. *Annals of tourism Research* 9.
- Cañada, Ernest. 2011. Tourism in Central America, Social conflict in a new setting, PRISMA and Alba Sud. Amerika.
- Creswell, John W. 2012. *Qualitative Inquiry and Research Design*. Sage Publication.
- Ertuna, Bengi, dan Gülşen Kirbaş. 2012. Local Community involvement in rural tourism development : The Case of Kastamonu. *Turkey, Pasos*, Vol. 10 No. 2 Special Issue.
- Green, B.E. 2005. A General Model of Natural Resources Conflicts; The Case of International Freshwater Disputes. *Sociologia*, Vol. 37 No.3 pp.227-248
- Harian Jogja. Separuh Desa Wisata di Sleman Stagnan. Selasa, 26 Juni 2012.
- Kedaulatan Rakyat. *Berebut Rupiah Goa Pindul* (3) . 27 Februari 2013.
- Mowforth, Martin dan Munt, Ian. 1998. *Tourism and sustainability: Development, Globalisation and New Tourism in the World*, Psikologi Press.
- Ritzer, George. 2011. *Sociological Theory*. McGraw-Hill Companies, Inc. New York.
- Rohim, Abdur. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata (Studi di Desa Wisata Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, DIY)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Supartini. *Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi desa wisata Ketingan Tirtodadi Mlati, Sleman*. <http://etd.ugm.ac.id/> dikutip tanggal 27 April 2016.
- Smelser, Neil. J. dan Richard Swedberg (editor). 2005. *The Handbook of Economic Sociology*. Second Edition. Princeton University Press.
- Tribun Jogja. Kamis, 14 Maret 2013. *Puluhan Warga Taruna Wisata Pindul Datangi POLDA DIY*.
- Tribun Jogja. *Pengembangan Desa Wisata di Bantul Terkendala Dana*, Kamis, 27 Maret 2014.
- Turner, Louis dan John Ash. 1975. *The Golden Hordes: International Tourism and the Pleasure Periphery*. Constable & Robinson Limited. London.
- UNWTO. Tourism Highlights, 2014 Edition. <http://mkt.unwto.org/> , dikutip 27 April 2016
- Widiatedja, IGN Parikesit. 2010. *Liberalisasi Jasa dan Masa Depan Pariwisata Kita*. Udayana University Press. Denpasar.